

## DAFTAR BACAAN

### 1. Buku-Buku

- Blaang, C.Djemabut. *Perumahan dan Pemukiman Sebagai Kebutuhan Pokok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Chomzah, Ali Achmad. *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia Jilid 2*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2004.
- Hadjon, Philipus Mandiri *et.al*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), *Yuridika*, No.6 Tahun XI November-Desember 1994.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Agraria Nasional*, Djambatan, Bandung, 1994.
- Hutagalung, Arie Sukanti. *Condominium dan Permasalahannya*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muchsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Malang, 2008.
- Perangin, Effendi, *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Pudyatmoko, Y. Sri, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2009.
- Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

- Siahaan, N.H.T., *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Airlangga, Jakarta, 1987.
- Sihombing, Irene Eka. *Segi-segi Hukum Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2005.
- Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sumardjono, Maria S.W., *Kebijakan Tanah: Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia Indonesia*, Ciawi-Bogor.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104).

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Dari yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158)

Penjelasan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Dari yang Berhak atau Kuasanya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35).

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68).

Penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67).

Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22).

Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

## **PERATURAN PEMERINTAH**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penataan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45).

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penataan Tanah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385).

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21)

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103)

#### **KEPUTUSAN PRESIDEN**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal.

Keputusan Presiden No 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

#### **PERATURAN MENTERI/ PERATURAN KEPALA BPN**

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

### **KEPUTUSAN MENTERI**

Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

### **INSTRUKSI MENTERI**

Instruksi Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Penataan Penguasaan Tanah Skala Besar.

### **3. Jurnal Penelitian**

Sartika Yunita Juanda, *Pemberian Izin Lokasi Sebagai Syarat Peningkatan Investasi di Daerah Ditinjau Dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011*, **Tesis**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Yenie Damayanti, *Koordinasi Antar Instansi dalam Perolehan Izin Lokasi Untuk Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Perumahan Mega Residence di Kota Semarang*, **Tesis**, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2006.

Wahyudi Siregar, *Pembatalan Izin Usaha Pertambangan Pada Wilayah Tambang di Kona We Selatan*, **Tesis**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tatiek Sri Djamiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, **Disertasi**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.